

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

Email: putriningtyas54@gmail.com, Uus.azzaleamu@gmail.com

**Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Jl. Pandawa Pucangan, Sukoharjo, Jawa Tengah**

Abstract

The aim of this research was to analyze the implementation of SFAS 101 in the presenting financial report of BMT as one of indicators BMT accountability, with the object of research at the BMT Wanita Mandiri Boyolali, and the focus of research on two aspects, namely analysis of the implementation of presenting financial report and analyzing what factors influence the implementation presenting financial report of BMT. This research was a field research using qualitative methods, where the data used was in the form of primary and secondary data. Primary data was obtained through documentation techniques, interviews, and observations, which were then analyzed using descriptive analysis techniques. The results showed that BMT Wanita Mandiri had presented financial report with the main reference is the standard set by the KEMENKOP, but in the obligation to meet sharia accounting standards, the financial report presentation of BMT Wanita Mandiri still contained several aspects that were not in accordance with PSAK 101. So that, based on the implementation of the financial statement presentation, BMT Wania Mandiri Boyolali was still less accountable. The existence of such incompatibility was caused by internal and external factors.

Keywords: PSAK 101, financial, report

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan BMT sebagai indikator akuntabilitas BMT. Objek penelitian pada BMT Wanita Mandiri Boyolali dan fokus pada analisis implementasi penyajian laporan keuangan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi penyajian laporan keuangan BMT yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Wanita Mandiri telah menyajikan laporan keuangan dengan acuan pokoknya adalah standar yang ditetapkan oleh kementerian koperasi, tetapi dalam kewajiban memenuhi standar akuntansi syariah, penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan PSAK 101, sehingga berdasarkan implementasi penyajian laporannya, BMT Wanita Mandiri Boyolali masih kurang akuntabel. Faktor penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan yang disajikan dengan PSAK 101 tersebut adalah karena faktor internal dan faktor eksternal.

Keywords: PSAK 101, Laporan, Keuangan

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

PENDAHULUAN

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ditinjau berdasarkan struktur namanya merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unsur yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*, yang kedua unsur dari nama tersebut mencerminkan kegiatan usahanya (Utomo *et.al*, 2014:148). *Baitul maal* berarti fokus kegiatan usaha BMT bergerak pada kegiatan yang tidak berorientasi laba, yaitu dengan menerima dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku, sedangkan *Baitul tanwil* berarti fokus kegiatan BMT pada kegiatan yang berorientasi profit dengan mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan usaha kecil dan mikro serta mendorong kegiatan menabung (Sari dan Hisamudin, 2014).

Berkaitan dengan aspek regulasi, saat ini pengawasan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) berada pada dua lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun, hampir seluruh BMT berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM (metrotvnews.com).

Sebagai entitas yang berada dibawah naungan Kementerian Koperasi, standar akuntansi keuangan BMT mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Nabilah dan Suprayogi, 2016). SAK ETAP berfungsi sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan (Nabilah dan Suprayogi, 2016), sedangkan standar akuntansi syariah berfungsi sebagai acuan dalam kerangka penyajian laporan keuangan dan acuan transaksi syariah pada BMT. SAK ETAP hanya berfungsi sebagai pedoman transaksi yang tidak diatur dalam PSAK syariah.

BMT sebagai pengelola dana umat memiliki tugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya, yang diantara bentuk pertanggungjawaban tersebut biasanya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu dari beberapa indikator akuntabilitas BMT, sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh BMT berfungsi sebagai media informasi bagi para pengguna laporan keuangan terkait dana yang telah diamanahkan kepada BMT.

Dalam penyajiannya, laporan keuangan BMT mengacu pada PSAK syariah 101. Menurut IAI, unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah terdiri dari komponen laporan keuangan kegiatan komersial, sosial, dan tanggungjawab khusus entitas syariah tersebut (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

Dibalik tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh BMT sebagai bentuk akuntabilitasnya dalam mengemban amanah mengelola dana umat, fenomena masih menunjukkan bahwa beberapa BMT masih menunjukkan kurang akuntabel ditinjau berdasarkan penerapan PSAK Syariah dalam pelaporan dan penyajian laporan keuangan. Realitas ini diantaranya ditemukan dari beberapa hasil penelitian antara lain; Sari (2014) yang menemukan hasil penelitian bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh KJKS UGT Sidogiri belum sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK Syariah. Ketidaksesuaian tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu ketidaksesuaian penyusunan laporan neraca, arus kas, perubahan ekuitas dengan PSAK Syariah dan SAK ETAP, serta belum disusunnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Naimah dan Ridwan (2014) yang menemukan hasil bahwa dalam penyajian laporan keuangan BMT X Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Ketidak sesuaian tersebut ditemukan diantaranya pada; laporan neraca BMT X Kudus belum memisahkan antara kewajiban dan Dana *Syirkah* Temporer (DST), dan dalam penggunaan istilah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS serta Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*.

Fenomena berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut yang masih menemukan hasil bahwa BMT yang diteliti belum sepenuhnya mengimplementasikan akuntansi syariah dalam pelaporan keuangannya menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengingat peran BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana umat, yang salah satu wujud akuntabilitasnya dilaksanakan dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh BMT sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

Objek penelitian yang diambil oleh peneliti pada studi ini adalah BMT Wanita Mandiri Boyolali. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada pertimbangan; (1) BMT Wanita Mandiri memiliki kekhasan, dimana pengelolanya adalah para wanita, (2)

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

BMT Wanita Mandiri mengalami progress atau kemajuan yang cukup signifikan, ditunjukkan dengan kenaikan nilai aset dari tahun 2012-2017, (3) dibalik kekhsan dan prestasi tersebut, BMT Wanita Mandiri masih terdapat beberapa persoalan diantaranya masih adanya *double job* antara manajer dan akuntan BMT, juga latar belakang pendidikan yang mayoritas non-akuntansi menyebabkan adanya perbedaan interpretasi mengenai akuntansi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Akuntabilitas BMT: Analisis berdasarkan Implementasi PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan*”. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada dua poin yaitu: (1) bagaimana implementasi penyajian laporan keuangan pada BMT Wanita Mandiri Boyolali ditinjau berdasarkan PSAK 101 sebagai salah satu indikator akuntabilitas *financial*, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 101 di BMT Wanita Mandiri Boyolali.

KAJIAN TEORITIK

Akuntabilitas

Terdapat beberapa definisi tentang akuntabilitas diantaranya Sedarmayanti (2003) mendefinisikan akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan individu atau organisasi dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Rakhmat (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah kewajiban bagi setiap individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, berkaitan dengan pengelolaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan. Akuntabilitas terdiri dari 5 perspektif (dimensi), yaitu (1) akuntabilitas hukum, (2) akuntabilitas program, (3) akuntabilitas proses, (4) akuntabilitas keuangan (*financial*) dan (5) akuntabilitas kebijakan. Pada penelitian ini, akuntabilitas BMT yang diteliti akan dianalisis secara fokus berdasarkan perspektif akuntabilitas *financial* dengan indikator kesesuaian dengan PSAK 101.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan (entitas syariah) adalah penyajian terstruktur posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas syariah. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang

bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomik. Selain itu, laporan keuangan juga memperlihatkan hasil pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan entitas syariah meliputi: Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik., Arus kas, Dana zakat, dan Dana kebajikan (IAI, 2014: 101.3)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

PSAK 101 merupakan pernyataan yang bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan entitas syariah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lain. Selain itu, dalam persyaratan ini juga diatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (IAI, 2014:101.1). Ruang lingkup pernyataan (PSAK) ini diterapkan oleh entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan SAK. Entitas syariah dalam pernyataan ini adalah entitas dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini menggunakan istilah yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi pada laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik (IAI, 2014 :101.1).

PSAK 101 paragraf 9 menyebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap suatu entitas syariah terdiri dari tujuh komponen, yaitu: (1) Laporan posisi keuangan, (2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, (3) Laporan perubahan ekuitas, (4) Laporan arus kas, (5) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat, (6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan (7) Catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait sumber daya, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 99). Penyajian laporan posisi keuangan entitas syariah minimal mencakup penyajian pos-pos berikut: (1) Kas dan setara kas, (2) piutang usaha dan piutang lainnya, (3) persediaan, (4) investasi dengan metode ekuitas, (5) aset keuangan, (6) total aset

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

yang dikelompokkan dalam aset untuk dijual dan aset dalam kelompok lepasan untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, (7) properti investasi, (8) aset tetap, (9) aset tak berwujud, (10) utang usaha dan terutang lainnya, (11) liabilitas keuangan, (12) liabilitas dan aset untuk pajak kini, (13) liabilitas dan aset pajak tangguhan, (14) liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan dimiliki untuk dijual, (15) provisi, (16) kepentingan non pengendali, dan (17) modal saham dan cadangan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan kinerja atau kegiatan entitas syariah pada periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban yang timbul dari kegiatan utama entitas syariah dan kegiatan operasi lainnya (Muljono, 2015: 321). Seluruh pos penghasilan dan beban diakui dalam suatu periode laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen komprehensif lain. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi meliputi pos-pos sebagai berikut: (1) pendapatan usaha, (2) bagi hasil untuk pemilik dana, (3) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, (4) beban pajak, (5) jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan (IAI, 2014: 101.15).

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan penambahan atau pengurangan ekuitas yang dimiliki entitas syariah yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan entitas syariah (Muljono, 2015: 376). Informasi yang harus disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu: (1) total penghasilan komprehensif selama satu periode, (2) dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif setiap komponen ekuitas yang diakui sesuai PSAK 25, (3) rekonsiliasi setiap komponen ekuitas, secara terpisah mengungkapkan perubahan dari laba rugi, (4) penghasilan komprehensif lain dan transaksi pemilik dalam kemampuannya sebagai pemilik (IAI, 2014: 101.19).

4. Laporan Arus Kas

Persyaratan pengungkapan dan penyajian laporan arus kas berdasarkan pada PSAK. Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas

dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas (IAI, 2014, 101.20). Laporan ini berisi arus kas masuk dan arus kas keluar entitas syariah. Dalam laporan arus kas terdapat beberapa aktivitas yaitu: (1) Sumber dan penggunaan kas operasional, (2) sumber dan penggunaan kas kegiatan investasi, (3) sumber dan penggunaan kas kegiatan pendanaan (Muljono, 2015:384).

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan ini menggambarkan sumber dan penggunaan dana zakat entitas syariah pada periode tertentu. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan: (1) dana zakat dari wajib zakat dalam entitas syariah maupun luar entitas syariah, (2) penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat, (3) kenaikan atau penurunan dana zakat, (4) saldo awal dana zakat, (5) saldo akhir dana zakat (IAI, 2014: 101.20).

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan entitas syariah, yang menunjukkan: (1) sumber dana kebajikan, (2) penggunaan dana kebajikan, (3) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, (4) saldo awal dana kebajikan, dan (5) saldo akhir dana kebajikan (IAI, 2014: 101.20).

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan dari hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan laporan keuangan berisi: (1) informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, (2) pengungkapan informasi yang disyaratkan dalam SAK dan tidak disajikan dalam bagian laporan keuangan manapun, (3) informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan (IAI, 2014: 101.21).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode (pendekatan) kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang diarahkan untuk memperoleh penjelasan secara mendalam mengenai penerapan

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

teori (Indrawan dan Yaniawati, 2014:29). Adapun penelitian ini dilakukan secara khusus di BMT Wanita Mandiri Boyolali.

Data pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dengan informan, juga didukung dengan teknik observasi. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Wanita Mandiri, sedangkan teknik wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan informan BMT Wanita Mandiri untuk mengklarifikasi data yang berhasil dikumpulkan dari teknik dokumentasi, juga untuk memperoleh penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penyajian laporan keuangan oleh BMT Wanita Mandiri. Adapun teknik observasi dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat temuan data dari teknik dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis data yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian atau situasi, dengan tahapan analisis data yang terdiri dari tahap reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi (Ali, 2014: 440).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan di BMT Wanita Mandiri Boyolali

Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur posisi dan kinerja keuangan dari entitas atau lembaga syariah (Naimah dan Ridwan, 2014). Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan (rugi laba), arus kas entitas syariah, yang berguna bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah diamanahkan kepada entitas.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 9, laporan keuangan yang lengkap entitas syariah terdiri dari tujuh komponen, yaitu: (1) Laporan posisi keuangan, (2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, (3) Laporan perubahan ekuitas, (4) Laporan arus kas, (5) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat, (6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan (7) Catatan atas laporan keuangan.

Dari penelitian yang dilakukan baik terhadap dokumen laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Wanita Mandiri, maupun hasil wawancara dengan informan, dalam menyajikan laporan keuangan khususnya berkaitan dengan komponen laporan keuangan yang disajikan, BMT Wanita Mandiri menggunakan dua *software* yaitu Mycis dengan output laporan keuangan yang dihasilkan yaitu: (1) Trial balance, (2) Rincian aktiva, (3) Rincian pasiva, (4) Rincian pendapatan, (5) Rincian biaya, (6) Rekapitulasi rekening, (7) Neraca, (8) Laba rugi, (9) Mutasi buku besar, dan (10) Arus kas. Sedangkan yang dihasilkan oleh *software* Ms.Excel yaitu dua laporan keuangan; (1) Catatan atas laporan keuangan, dan (2) Laporan zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan temuan data tersebut, BMT Wanita Mandiri baru menyajikan beberapa komponen laporan keuangan yang sesuai PSAK 101, yaitu laporan neraca, laba rugi, arus kas, laporan ZIS dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun demikian, komponen-komponen tersebut secara penamaan pun masih belum sesuai dengan ketentuan penamaan yang diatur dalam PSAK 101. Selain itu, pada penyajian laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah juga masih disajikan dalam satu laporan keuangan yaitu laporan zakat, infak dan sedekah, belum terpisah menjadi laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Penyajian laporan keuangan BMT Mandiri yang masih belum sesuai khususnya pemenuhan komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan disebabkan oleh karena saat ini BMT Wanita Mandiri masih menyajikan komponen-komponen laporan keuangan dengan mengacu kepada ketentuan atau standar yang ditetapkan oleh kementerian koperasi, sehingga masih ada beberapa komponen laporan keuangan yang diatur dalam PSAK belum diterapkan. Hasil penelitian ini diantaranya didukung oleh penjelasan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Yang standardnya, ya itu tadi kita mengacu ke dinas koperasi aja. Kalau secara syariah belum begitu dalam, soalnya belum ada yang menangani. Belum ada lembaga khusus juga terkait akuntansi syariah, jadi kita belum maksimal kesana”(Triwik, 22 Desember 2018).

Analisis atas setiap komponen laporan keuangan

Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait sumber daya, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 99). Penyajian laporan posisi keuangan entitas syariah minimal mencakup penyajian pos-pos berikut; (1) Kas dan setara kas, (2) Piutang usaha dan piutang lainnya, (3) Persediaan, (4) Investasi dengan metode ekuitas, (5) Aset keuangan, (6) Total aset yang dikelompokkan dalam aset untuk dijual dan aset dalam kelompok lepasan untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, (7) Properti investasi, (8) Aset tetap, (9) Aset tak berwujud, (10) Utang usaha dan terutang lainnya, (11) Liabilitas keuangan, (12) Liabilitas dan aset untuk pajak kini, (13) Liabilitas dan aset pajak tangguhan, (14) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan dimiliki untuk dijual, (15) Provisi, (16) Kepentingan non pengendali, (17) Modal saham dan cadangan yang diatribusikan kepada pemilik pemilik entitas induk.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang disajikan, BMT Wanita Mandiri telah menyajikan laporan posisi keuangan, akan tetapi laporan posisi keuangan yang disajikan tersebut masih belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) Masih digunakannya istilah lama neraca, aktiva dan kewajiban.
- 2) Belum dilakukannya penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
- 3) Belum disajikannya Dana *Syirkah* Temporer pada laporan posisi keuangan BMT Wanita Mandiri.
- 4) Adanya perbedaan unsur dalam laporan posisi keuangan, berdasarkan PSAK 101 unsur laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, DST dan ekuitas. Sedangkan, unsur laporan posisi keuangan BMT Wanita Mandiri terdiri dari aset, kewajiban, investasi tidak terikat *mudharabah* dan ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan penghubung antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi (Naimah dan Ridwan, 2014). Laporan ini bermanfaat untuk melihat perubahan serta kenaikan dan penurunan ekuitas yang dimiliki oleh

entitas syariah. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 111 menyatakan bahwa laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Total penghasilan komprehensif selama satu tahun, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.
- 2) Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui PSAK 25 untuk setiap komponen.
- 3) Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir yang mengungkapkan secara terpisah perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen laporan keuangan, yang didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan, BMT Wanita Mandiri belum menyajikan laporan perubahan ekuitas secara khusus. Perubahan ekuitas yang disajikan masih berupa pos atau akun yang terdapat dalam neraca. Hal tersebut karena adanya pemahaman bahwa perubahan modal sudah dapat dilihat perubahannya dari perbandingan neraca tahun ini dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana salah satu kutipn hasil wawancara dengan informan:

“Endak. Ekuitas Paling ya perbandingan dari disajikan kembalikan dari tahun kemarin 2017 disandingkan dengan 2018 ada perubahan modal, ada paling penambahan jumlah anggota”(Triwik, 22 Desember 2018).

Selain itu, penyajian laporan perubahan ekuitas masih menjadi catatan dari Dinas Koperasi, mengingat jumlah modal BMT masih sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Ini sesuai dengan salah satu kutipan hasil wawancara dengan informan:

“Belum, masih ikut dalam neraca kelihatan gitu angkanya. Iya, enggeh kemudian kemaren itu juga jadi catatan dari dinas koperasi karena modal kita sangat kecil dibandingkan dengan aktiva kita, bukan aktiva apa namanya ya aset. Kan harusnya 10% ya kita masih kurang dari itu. Kemarin dari dinas dimohon bahwa kita kan mengambil dana dari pihak ketiga. Kemarin catatan dari dinas seperti itu....” (Yulis, 10 Januari 2019).

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Dalam PSAK 101 paragraf 117 disebutkan bahwa laporan arus kas disusun dengan berdasarkan pada PSAK 2 yang mengatur

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Laporan arus kas juga menunjukkan adanya arus kas masuk dari pendapatan dan pinjaman pihak ketiga serta arus kas keluar dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan. PSAK 2 tentang laporan arus kas disebutkan bahwa klasifikasi laporan arus kas terbagi menjadi tiga yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (Naimah dan Ridwan, 2014).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang disajikan, BMT Wanita Mandiri belum menyajikan laporan arus kas secara tersendiri. Secara *contain* laporan arus kas, pihak BMT berasumsi bahwa laporan arus kas telah disajikan berupa pos atau akun kas dalam neraca dengan perbandingan atau dalam *trial balance*. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara berikut:

“Iya trial balance. Nek arus kas kan berarti bulanan setiap akhir bulan. Biasanya tahun 2017 dengan 2018 ada perbandingan”(Triyati, 12 Januari 2019). *“He em ada. Banyak komponennya, kas teller kemudian ada kas besar, kas di bank itu aja”*(Yulis, 10 Januari 2019).

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat *miss* terkait penyajian laporan arus kas. Hal ini dikarenakan masih belum tersedianya SDM yang secara khusus berlatar belakang ekonomi atau akuntansi. Sehingga dalam penyajian laporan keuangan, tidak hanya laporan arus kas, BMT Wanita Mandiri menyajikan berdasarkan pemahaman dan sosialisasi yang diperoleh baik dari Dinas Koperasi maupun lembaga lain.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan ini menggambarkan sumber dan penggunaan dana zakat entitas syariah pada periode tertentu. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan: (1) Dana zakat dari wajib zakat dalam entitas syariah maupun luar entitas syariah, (2) Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat, (3) Kenaikan atau penurunan dana zakat, (4) Saldo awal dana zakat, dan (5) Saldo akhir dana zakat (IAI, 2014: 101.20).

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen laporan keuangan, Penyajian laporan keuangan ini oleh BMT Wanita Mandiri menggunakan istilah yang berbeda yaitu laporan zakat, infak dan sedekah. BMT Wanita Mandiri belum memisahkan antara zakat dengan infak dan sedekah, padahal dalam ketentuan PSAK 101 paragraf 123 dinyatakan bahwa dana infak dan sedekah dikategorikan dalam laporan sumber

dan penggunaan dana kebajikan. Penyajian laporan dibuat oleh BMT Wanita Mandiri dalam format yang masih sangat sederhana, berupa tabel atau kolom seperti jurnal, dengan unsur-unsur yang dilaporkan terdiri dari saldo awal dana ZIS, sumber funding dana ZIS, penyaluran dana ZIS dan saldo akhir dana ZIS. Penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat BMT Wanita Mandiri belum sesuai dengan PSAK 101. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Dana zakat masih disajikan tergabung dengan dana infaq dan shodaqoh.
- 2) Penyaluran dana zakat masih belum sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Laporan yang disajikan masih sangat sederhana berupa tabel dan belum menyajikan kenaikan dan penurunan dana zakat.
- 4) Istilah yang digunakan belum sesuai dengan PSAK 101, yaitu laporan zakat, infak dan sedekah.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan kebajikan merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan entitas syariah. Laporan ini memberikan informasi mengenai perolehan dan penggunaan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 123 komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan adalah:

- 1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non halal.
- 2) Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan, sumbangan dan penggunaan lain untuk kepentingan umum.
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
- 4) Saldo awal dana kebajikan.
- 5) Saldo akhir dana kebajikan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Wanita Mandiri, BMT belum sesuai dengan PSAK 101 karena belum menyajikan komponen laporan ini. Adapun dalam pengelolaan dana infaq dan sedekah yang ada di BMT Wanita Mandiri, masih digabung dengan zakat pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Selain itu terkait dana kebajikan di BMT Wanita

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

Mandiri hanya terbatas pada pinjaman *qardul hasan* atau pinjaman kebajikan. Saldo dari pinjaman ini paling kecil jika dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu Rp760.000,00. Pelaporan dana ini pun masih bersama dalam neraca. Sehingga tidak terdapat laporan khusus untuk menyajikan dana kebajikan.

“Ada tetapi terbatas qardul hasan pinjaman kebajikan. Cuma ya terbatas dari saldonya itu saja. Nggak Sempat Dilayani”(Triwik, 22 Desember 2019).

“Disajikan bareng dengan neraca, di aktiva itu ada pembiayaan murabahah, ijarah, qardhul hasan ada di dalam neraca”(Yulis, 10 Januari 2019).

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi-informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan bagian manapun. Catatan ini bersifat menjelaskan akun-akun dalam laporan keuangan yang belum disajikan dalam laporan keuangan. Berikut ini format penyajian catatan atas laporan keuangan BMT Wanita Mandiri. Dalam PSAK 101 paragraf 129 disebutkan bahwa: “Catatan atas laporan keangan memuat informasi:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 133-140.
- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.
- 3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen laporan keuangan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dibuat oleh BMT Wanita Mandiri, dapat disimpulkan bahwa CALK yang disajikan oleh BMT Wanita Mandiri Boyolali belum sesuai dengan PSAK 101, hal ini dapat dilihat dari empat indikator, yaitu:

- 1) CALK BMT Wanita Mandiri baru menyajikan penjelasan pos-pos dalam laporan neraca dan perhitungan hasil usaha.
- 2) CALK BMT Wanita Mandiri belum menyajikan dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan spesifik yang digunakan.
- 3) Belum disajikannya pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK.

- 4) Penyajian aset dalam *CALK* belum sesuai dengan kebijakan akuntansi yang menyajikan harga perolehan, nilai buku dan akumulasi dengan perbandingan beban penyusutan setahun.

Dari kedua poin besar hasil analisis dan pembahasan diatas, yaitu (1) penyajian komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan ketentuan PSAK 101, dan (2) penyajian akun-akun pada setiap komponen laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 101, BMT Wanita Mandiri Boyolali masih kurang akuntabel dalam penyajian laporan keuangannya, karena BMT yang diteliti belum membuat komponen laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 101, dan akun-akun yang diungkapkan dalam setiap komponen laporan keuangan juga belum sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 101.

Faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 101 di BMT Wanita Mandiri Boyolali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BMT Wanita Mandiri dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101. Masih terdapatnya ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor Internal, adalah faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam entitas yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101. Faktor internal tersebut antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pengelola terkait dengan laporan keuangan. Hal ini terlihat dalam beberapa pertanyaan terkait laporan keuangan dan komponen laporan keuangan, seperti:

- 1) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

“Disajikan bareng dengan neraca, di aktiva itu ada pembiayaan murabahah, ijarah, qardhul hasan ada di dalam neraca”(Yulis, 10 Januari 2019).

- 2) Laporan neraca atau posisi keuangan

“Iya menyajikan. Boleh buka? Kan ada aktiva itu, aktiva kan kekayaan, pasiva kan kewajiban kita, modal gitu gitu. Trus apa ya ra nggak hafal, Mbak karena nggak pernah buka”(Yulis, 10 Januari 2019).

- 3) Laporan arus kas

“He em ada. Banyak komponennya, kas teller kemudian ada kas besar , kas di bank itu aja”(Triwik, 22 Desember 2018).

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengetahuan dan pemahaman laporan keuangan dan komponennya pengelola BMT Wanita Mandiri masih terbatas. Selain itu, dalam beberapa laporan keuangan yang bersifat wajib seperti arus kas dan perubahan ekuitas laporan yang disajikan baru sebatas penyajian akun atau pos dalam neraca.

“Kebanyakan aktivis BMT atau koperasi itu kalau latar belakangnya tidak ekonomi dia harus belajar dari nol dan pelatihan-pelatihan dari dinas koperasi, pelatihan-pelatihan perhimpunan BMT. Gimana membaca laporan keuangan aja dari pelatihan itu dan disesuaikan dengan keseharian kita akhirnya bisa”(Triwik, 22 Desember 2019).

- b. Belum dilaksanakannya SOP secara 100%. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam melaksanakan tugas dan operasional entitas. Pelaksanaan sesuai dengan SOP akan berpengaruh terhadap kinerja entitas termasuk dalam penerapan standard yang digunakan.

“Kita SOP sudah ada, dari manajer sampai dengan semuanya sebenarnya sampe teller gitu. Cuma memang untuk kesehariannya belum 100% kita laksanakan. Mungkin baru mendekati 75%”(Yulis, 10 Januari 2019).

- c. Terbatasnya SDM yang dimiliki. Dalam kegiatan operasional BMT Wanita Mandiri, keterbatasan SDM ini mengakibatkan adanya *double job*. Selain itu, BMT Wanita Mandiri belum memiliki SDM yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukan pencatatan hingga penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101.

“Karena pertama SDM kami masih terbatas, jadinya beberapa dari kami masih double fungsi, masih double job.... Wes pokoknya semua masih multifungsi. Tapi dalam hal tersebut untuk bisa mencapai 100%, kita sudah mulai ada penataan. InsyaAllah di 2019 kami ada fokus penataan SOP”(Yulis, 10 Januari 2019).

“Kendalanya memang kita belum ada tenaga, pengelola yang memang khusus akuntansi...”(Triyati, 12 Januari 2019).

- d. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pengelola terkait standar BMT khususnya penyajian laporan keuangan.

“Menurut saya standard yang digunakan BMT itu yang bisa dipahami, dari dinas koperasi itu sudah cukup”(Triwik, 22 Desember 2019). *“Belum, akhirnya dari kita menyajikan yang penting sesuai sama ketentuan dari dinas koperasi gitu. Belum rigid gitu...”*(Yulis, 10 Januari 2019).

- e. Kurangnya pengawasan dari pihak internal BMT Wanita Mandiri. Pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan secara sederhana dilakukan oleh pengawas

BMT. Pengawas sendiri memiliki keterbatasan ilmu, sehingga dalam pengawasannya pun terbatas. Pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan hanya berfokus pada akad-akad tidak mendetail hingga penyajian laporan keuangan dan standar yang digunakan.

“...Karena DPS kita kalau dalam hal penyajian laporan keuangan tidak begitu diperhatikan, kan lebih ke akad-akad syariah nya...”(Triwik, 22 Desember 2018).

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar entitas yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri menurut PSAK 101. Faktor eksternal tersebut antara lain:

- a. Minimnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan BMT, khususnya terkait PSAK. Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi biasanya bersifat secara umum tanpa membedakan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. Pelatihan yang dilakukan hanya berkisar pada operasional koperasi secara umumnya saja. Sosialisasi terkait laporan keuangan pernah dilakukan, namun sekitar tiga tahun yang lalu.

“Iya pelatihan itu dari dinas koperasi pun lebih ke umum ya, Mba. Kalau untuk syariah ya luar-luarnya saja, jadi secara umumnya saja belum sampai ke dalam” (Triwik, 22 Desember 2018).

“Sekarang kan akhirnya jadi jarang mungkin tiga tahun atau empat tahun yang lalu itu, itu sekalian bahas tentang koperasi sekalian bahas tentang laporan keuangan untuk persiapan rapat anggota tahunan dan penilaian koperasi gitu dari dinas itu seperti itu perihalnya” (Yulis, 10 Januari 2019).

- b. Kurangnya SDM dari Dinas Koperasi yang memiliki pengetahuan memadai terkait penyajian laporan keuangan atau PSAK. Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya SDM pada Dinas Koperasi menyebabkan tidak maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada BMT dan koperasi-koperasi konvensional. Bahkan terkadang, SDM dari dinas koperasi sendiri tidak begitu memahami standar yang berlaku seperti PSAK.

Hal tersebut mengakibatkan BMT dalam penerapan standar yang berlaku belum maksimal. Akhirnya dalam penerapan penyajian laporan keuangan hanya sekedar mengikuti aturan dari Dinas Koperasi, namun tidak terlalu mendalam.

“Lha, kadang dari pegawai Dinkop untuk mengacu ke PSAK syariah itu kan kekurangan SDM, jadi belum bisa maksimal. Tidak sampai yang mendetail, jadi kita yang masih harus belajar” (Triwik, 22 Desember 2018).

AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Putriningtyas, Usnan

“Nggak ada, nggak ada SDM yang sampe seperti itu. Ya sangat terbatas, Mbak mereka kan PNS Cuma dikasih pelatihan sebentar, kadang yo ra mudeng , akad-akad yo ra mudeng”(Yulis, 10 Januari 2019).

- c. Belum adanya lembaga atau wadah terkait PSAK jika terdapat pertanyaan mengenai PSAK. Mayoritas aktivis BMT tidak memiliki latar belakang ekonomi atau bahkan akuntansi syariah. Penerapan standar PSAK di BMT Wanita Mandiri masih terdapat kebingungan dan pertanyaan. Aktivis BMT mayoritas kebingungan kepada siapa mereka bertanya, karena tidak terdapat lembaga yang khusus menangani problem terkait PSAK.

“Kalau secara syariah belum begitu dalam, soalnya belum ada yang menangani. Belum ada lembaga khusus juga terkait akuntansi syariah, jadi kita belum maksimal kesana”(Triwik, 22 Desember 2018).

“...Soalnya kalau PSAK Syariah belum ada payung hukumnya, kalau kita kebingungan kita mau tanya kemana tanya siapa konsultasi ke siapa gitu...”(Triwik, 22 Desember 2018).

Adanya beberapa faktor diatas menyebabkan penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri belum sesuai dengan PSAK 101. Faktor-faktor tersebut berpengaruh tersebut salah satunya mengakibatkan BMT Wanita Mandiri hanya menyajikan laporan keuangan berdasarkan pada kebutuhan saja. Tidak semua laporan keuangan disajikan baik dalam RAT maupun dalam kesehariannya. Secara garis besar, faktor internal dan faktor eksternal tersebut berpengaruh terhadap pemahaman pengurus dan pengelola yang mengakibatkan terbatasnya laporan keuangan yang disajikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi pada bagian analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa BMT yang diteliti yaitu BMT Wanita Mandiri Boyolali masih kurang akuntabel ditinjau berdasarkan implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan, yang ditunjukkan oleh dua indikator yaitu (1) penyajian komponen-komponen laporan keuangan yang belum lengkap sesuai dengan ketentuan PSAK 101, dan (2) penyajian akun-akun pada setiap komponen laporan keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Masih adanya beberapa ketidaksesuaian tersebut, selain disebabkan oleh karena BMT Wanita Mandiri saat ini dalam penyajian laporan keuangan standar pokoknya masih mengacu pada SAK

yang ditetapkan oleh kementerian koperasi (SAK ETAP), juga disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor *internal* dan *eksternal* sebagai berikut: Faktor *internal*, diantaranya kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pengelola terkait dengan laporan keuangan dan standar akuntansi untuk BMT (PSAK), terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, belum dilaksanakannya SOP secara 100%, dan kurangnya pengawasan dari pihak internal BMT. Faktor *eksternal*, diantaranya minimnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan BMT, kurangnya SDM dari Dinas Koperasi yang memiliki pengetahuan memadai terkait penyajian laporan keuangan atau PSAK, dan belum adanya lembaga atau wadah terkait jika terdapat pertanyaan mengenai PSAK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. (2014). *Memahami Riset Perilaku dan Sosisal*. Cetakan pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Apriyanti, Heni Werdi. (2017). Akutansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.6, No. 2, 131-140.
- Badiah, Siti, Ni Luh Gede Erni Sulindawaty dan Edy Sujana. (2015). Analisis Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis PSAK Syariah 101 (Studi Interpretif Pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 3, No. 1.
- Hendrian dan Rini Dwiyani Hadiwidjaja. (2016). Implementation of Accounting Standard on Small and Medium-Sized Entities (SMeS). *Global Journal of Business and Social Science Review*. Vol.4, No.4, 68-78.
- Hizazi, Achmad, Susfayetti dan Sri Rahayu. (2010). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al-Islah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Versi Humaniora*. Vol. 12, No. 2.
- IAI (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. (2014). *Metodologi Penelitian , Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muljono, Djoko. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

**AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI
PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Putriningtyas, Usnan

- Nabilah dan Noven Suprayogi. (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol.3, No. 10, 843-855.
- Naimah, Umi Fauzul dan Murtadho Ridwan. (2014). Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT X Kudus. *Iqtishadia*. Vol. 7, No.1, 59-84.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Puhi, Ismail. (2013). Penerapan Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Kinerja Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Al-Mizan*. Vol. 9, No. 1, 163-180.
- Ramadhan, Anugrah Gilang dan Indah Mustikawati. (2016). Analisis Penggunaan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan BMT Karisma. *Jurnal Profita*. Edisi Tiga.
- Rakhmat.(2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Banten: Pustaka Arif.
- Sari, Tika Wahyu Puspita dan Nur Hisamudin. (2014). Analisis Struktur dan Komponen Laporan Keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi. *Iqtishadia*. Vol.7, No. 1, 45-58.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*., Bandung: Mandar Maju.
- Sulistyandari. (2018). Analisis Perbandingan laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru Dengan PSAK 101. *Menara Ekonomi*. Vol. IV, No. 1.
- Utomo, Arif Punto et, al. (2014). *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Jakarta: Gress Publishing.
- NN. *Babak Baru BMT di Indonesia*. 21 September 2018. www.metrotvnews.com